

## Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah

Zakiyah Darajat

Dosen Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [zakiya.darajat@uinjkt.ac.id](mailto:zakiya.darajat@uinjkt.ac.id)

### Abstract

*Discourse on the relationship between religion and state seems to be a discourse that never ends to be discussed. The emergence of a statement of President Jokowi on March 24, 2017 which discourse the separation between religion and politics immediately launched a public reaction. Some agreed, but many also criticized. For those who agree with the statement Jokowi reasoned that religion is often used as a politician tool that has the potential to divide the nation. But for those who reject Jokowi's statements argue that the separation of religion from the state is the same as denying the basis and philosophy of the state which has historically been extracted from the values of the religiosity of the Indonesian nation itself. Using historical, sociological and political approaches, this article intends to analyze how discourses on the relation between religion and state taking place in Indonesia in the historical perspective, as well as the problems it causes. This paper proves that although experiencing ups and downs, judging from the historical geneologi, the life of the nation and the state of Indonesia can not be separated from the values of religiosity. Both are always symbiotic mutualism. Putting the Godhead of the One Supreme God as the first principle in Pancasila, is in fact an acknowledgment of the importance of religious values in the life of the nation and the state.*

**Keywords:** Religion, State, Religious Values, Secularism.

### Abstraks

*Diskursus tentang relasi antara agama dan negara seolah menjadi wacana yang tak pernah usai untuk dibahas. Munculnya statemen Presiden Jokowi pada 24 Maret 2017 yang mewacanakan pemisahan antara agama dan politik segera menyeruakkan reaksi publik. Ada yang mengiyakan, tapi banyak juga yang mengecam. Bagi yang setuju dengan statemen Jokowi beralasan bahwa agama sering kali dijadikan sebagai alat politisasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Namun bagi mereka yang menolak statemen Jokowi berargumentasi bahwa upaya pemisahan agama dari negara sama halnya dengan mengingkari dasar dan falsafah negara yang secara historis justru digali dari nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosiologis dan politik, artikel ini bermaksud menganalisis bagaimana diskursus tentang relasi antara agama dan negara yang terjadi di Indonesia dalam perspektif sejarah, serta problematika yang ditimbulkannya. Tulisan ini membuktikan bahwa meskipun mengalami pasang surut, dilihat dari geneologi kesejarahan, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religiusitas. Keduanya senantiasa bersimbiosis mutualisme. Diletakkannya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, sejatinya merupakan sebuah pengakuan akan pentingnya nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*

**Kata Kunci:** Agama, Negara, Nilai-nilai Religiusitas, Sekulerisme.

## A. Pendahuluan

Dalam kaitan antara agama dan negara, paling tidak kita mengenal tiga tipe negara. Pertama adalah negara theokrasi, yaitu negara yang mendasarkan pemerintahannya kepada satu agama tertentu. Kerajaan Arab Saudi, Republik Islam Iran, Pakistan, dan sebagainya adalah contoh profil negara yang secara konstitusional menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pada kasus yang lain, Negara Jepang, Thailand dan Kamboja meski secara eksplisit tidak menyatakan Budha atau Konghuchu sebagai agama resmi negara, akan tetapi mereka meyakini raja mereka sebagai titisan dewa. Sedangkan Vatikan secara resmi menyatakan Katholik sebagai agama resmi negara.

Tipe negara kedua adalah negara sekuler, yang beranggapan agama sebagai masalah privat yang karenanya negara tidak berhak mencampuri urusan keagamaan setiap warga negaranya. Runtuhnya Kesultanan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal Attaturk menandai lahirnya sekulerisme ekstrem di Turki, di mana simbol-simbol agama sangat dilarang untuk hadir dalam wilayah publik. Sekulerisme juga diterapkan di negara-negara Barat, meski dalam tataran praksis, sekulerisme yang diterapkan di Amerika Serikat berbeda dengan sekulerisme yang diterapkan di Perancis. Tipe berikutnya adalah komunis, yang menganggap agama sebagai candu. China dan Kuba adalah sedikit contoh dari negara yang berpandangan seperti ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara *de facto*, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Anehnya, Indonesia bukanlah negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negaranya, dan lebih memilih menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan dasar Negara Indonesia. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan hingga

masa pergerakan ketika unsur-unsur dasar negara dirumuskan oleh para *founding fathers* negeri ini. Perdebatan yang sangat alot tentang dasar negara, apakah negara berdiri di atas landasan agama tertentu ataukah tidak, akhirnya berakhir dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sebuah konsensus yang disepakati oleh semua komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan kelompok atau golongan.

Dinamika tentang relasi antara agama dan negara nyatanya tidak berhenti pasca ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan dasar negara Indonesia. Masih dalam masa pergerakan, beberapa kelompok anak bangsa pernah melakukan upaya mengganti dasar negara dengan ideology yang mereka yakini. Tahun 1948 Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Semaun melakukan upaya makar untuk mengganti ideology Pancasila dengan ideology komunis, sebuah ideology yang menihilkan agama. Sedangkan Kartosoewirjo menginginkan Islam sebagai ideology negara dengan mendirikan Darul Islam (DI/TII) di tahun 1949. Ideologi komunis tidak selaras dengan watak asli bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-religiusitas di setiap lini kehidupannya. Sementara pemaksaan Islam untuk dijadikan sebagai dasar negara menunjukkan pengingkaran terhadap realitas bangsa Indonesia yang plural.

## B. Metode

Selain menggunakan pendekatan sejarah, artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan politik dan theologis-normatif. Pendekatan politik digunakan untuk mengamati bagaimana pola kepemimpinan, hubungan struktural, serta kebijakan politik mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Sedangkan pendekatan theologis-normatif digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman keagamaan seseorang

mampu mempengaruhi dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan pemahamannya tersebut.<sup>1</sup>

### C. Pembahasan

#### Kerajaan (Negara) Berbasis Agama; Pengalaman Nusantara

Religiusitas menjadi karakteristik asli bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Jauh sebelum datangnya agama-agama di tanah Nusantara, nenek moyang kita telah meyakini adanya sesuatu yang transedental di balik semua yang terjadi di alam ini. Untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya, mereka kemudian melakukan ritual-ritual khusus sebagai ekspresi keyakinan mereka terhadap dzat transedental ini. Inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai animisme dan dinamisme.

Hadirnya agama-agama di tanah Nusantara, Hindu dan Budha pada awal abad pertama masehi dan kemudian Islam pada abad ke-7 M berlangsung dengan sangat persuasive. Akulturasi yang terjadi antara budaya local dengan budaya luar tersebut berlangsung cukup harmonis dan bahkan berdampak sangat besar. Agama baru ini segera disambut dan dianut oleh penduduk setempat, yang kemudian disusul dengan kehadiran bangunan-bangunan keagamaan yang penuh dengan nuansa tradisi agama tersebut. Bangunan keagamaan ini, dilihat dari rekayasa arsitekturnya menampilkan cakrawala baru bagi budaya local setelah menerima pengaruh agama Hindu, Budha, juga Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan agama-agama ini semakin pesat ketika ia mulai memasuki wilayah kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa hubungan yang terjalin antara penguasa (raja) dan pemuka agama

(pendeta, ulama) bersifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam menjelaskan bentuk simbiosis ini adalah berupa pemberian legitimasi dari pendeta kepada raja bahwa raja adalah titisan dewa. Sedangkan pendeta mendapatkan emas dari sang raja.<sup>3</sup> Dengan simbiosis mutualisme inilah posisi raja semakin legitimate di mata rakyatnya, dan sebaliknya, agama semakin terlindungi di bawah kekuasaan penguasa. Bahkan lebih jauh, pada akhirnya agama tersebut menjadi agama resmi negara.

#### Kerajaan Berbasis Agama Hindu

Sejarah mencatat beberapa kerajaan di Nusantara berbasis agama Hindu antara lain adalah Kerajaan Mataram Hindu. Berdasarkan temuan prasasti Canggal, Kedu dan Taji Gunung, penguasa Mataram Hindu adalah Raja Sanjaya (732 M). Dalam struktur pemerintahan Mataram, raja adalah penguasa tertinggi. Ia digambarkan sebagai titisan para dewa di bumi. Dalam naskah kuno Ramayana Kakawin ditegaskan adanya *rajadharma*, yaitu tugas dan kewajiban seorang raja. Salah satu ajaran *rajadharma* adalah *asthabrata*, yaitu serorang raja haruslah mempunyai perpaduan jiwa dari delapan dewa, yaitu Dewa Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni.<sup>4</sup> Raja Sanjaya sendiri adalah penganut ajaran Syiwa. Di antara peninggalan Raja Sanjaya yang hingga kini masih tegak berdiri adalah Candi Prambanan. Berdiri di atas tanah seluas 1200 kaki persegi dengan 156 buah candi. Candi Loro Jonggrang digambarkan sebagai Dewi Durga, Istri Dewa Syiwa. Tiga bangunan lainnya diperuntukkan untuk Dewa Brahma,

<sup>1</sup> Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999).

<sup>2</sup> Ambary. Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban Arkeologi Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Puslit Arkenas, 1998), 53.

<sup>3</sup> 'Negara, Pendeta Dan Raja', *Forum Keadilam*, 2000.

<sup>4</sup> Vieke, Bernard H,M, *Nusantara; History of Indonesia* (Kuala Lumpur: Tien Wan Press, 1966), 33.

Wisnu dan Syiwa. Candi-candi ini dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan peristiwa Ramayana, salah satu epic besar Hindu.<sup>5</sup>

Kerajaan lainnya berbasis Hindu adalah Kerajaan Kalingga yang dipimpin seorang ratu yang terkenal sangat jujur dan adil, Ratu Shima. Berikutnya di Jawa Timur, adalah Raja Airlangga. Pada masa pemerintahannya dikarang Kitab Arjunawiwaha, sebuah cerita yang diambil dari salah satu epic Hindu kuno, Mahabharata, yang kemudian menjadi karya sastra Jawa tertua dan terindah.<sup>6</sup> Kerajaan Singasari dengan rajanya Ken Arok hingga Kertanegara pada abad 14, serta Majapahit dengan rajanya yang terkenal Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada, adalah contoh kerajaan yang banyak mendapat pengaruh Hindu yang dibawa para peziarah dari India, yang kemudian mengelaborasi dengan budaya setempat menjadi kebudayaan Hindu-Jawa. Kitab Pararaton adalah salah satu contoh peninggalan besar dari mereka.

### **Kerajaan Berbasis Agama Budha**

Sementara itu, pengaruh Budha tercermin dalam kerajaan di Jawa Tengah keturunan Raja Sanjaya dari Mataram, yaitu Raja Syailendra (760-820 M). Peninggalan Dinasti Syailendra yang paling monumental adalah Candi Borobudur, tempat peribadatan terbesar agama Budha sedunia. Bangunan yang terletak di daerah Magelang, tidak jauh dari Yogyakarta dan menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini tersusun dari bebatuan yang dibangun betingkat dengan beberapa stupa dan 400 patung Budha, dengan 1400 relief. Tiap relief menggambarkan cerita yang berhubungan dengan tradisi Budha. Salah satunya mencerminkan Sidharta Gautama, seorang pangeran putra Ratu Naya, yang memilih meninggalkan istana untuk

bertapa menjadi bodhisatwa hingga akhirnya mencapai tingkat Bodhi, tingkat kebijaksanaan hakiki dan menjadi seorang Budha.

Kerajaan Budha lainnya adalah Kerajaan Sriwijaya, terletak di dekat Sungai Musi, beribu kota Palembang. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 dan masih keturunan Dinasti Syailendra ini merupakan kerajaan Budha yang makmur dan memiliki pengaruh besar terutama di Asia Tenggara, baik di bidang ekonomi, perdagangan, juga politik. Menurut I Tsing, peziarah Budha asal China yang melakukan pelayaran pada tahun 671-692 M, Sriwijaya dikenal sebagai tempat memperdalam agama Budha, terutama Budha Mahayana. Selama enam bulan menetap di Sriwijaya, ia mencatat ada sekitar 1000 pendeta Budha menetap di sana. Para raja Sriwijaya tampil sebagai pelindung Budha. Hubungan antara raja-raja Sriwijaya dengan India dan China juga terjalin sangat baik. Tahun 850 M seorang raja Sriwijaya mendirikan Universitas Budha di Nalanda, Benggala. Tahun 1005 Raja Marawijayatunggawarman mendirikan candi Cudamanivarnavihara di Nagapatam, India. Ini menggambarkan hubungan yg sangat baik antara Sriwijaya dan India.<sup>7</sup>

### **Kerajaan Berbasis Agama Islam**

Periode masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya membuka lembaran baru wajah kerajaan Nusantara.<sup>8</sup> Proses Islamisasi berjalan dengan sangat damai, tanpa pergolakan, baik dengan budaya local maupun dengan agama yang terlebih dahulu hadir di tanah nusantara. Islam diperkenalkan di Nusantara antara lain dengan

<sup>5</sup> Vieke, Bernard H,M, 36.

<sup>6</sup> Vieke, Bernard H,M, 47.

<sup>7</sup> Puspongoro, Marwah Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 69.

<sup>8</sup> Ambary. Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban Arkeologi Dan Islam Di Indonesia*, 53.

menggunakan jalur perdagangan, sebuah media yang sangat melekat dengan tradisi masyarakat Nusantara. Aktivitas perdagangan meniscayakan adanya interaksi sosial yang mutualisme antara penjual dan pembeli, kesederajatan, serta jauh dari kesan permusuhan ataupun perasaan superioritas-inferioritas.

Selain melalui jalur perdagangan, media budaya menjadi salah satu sarana penyebaran Islam yang sangat efektif bagi masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Para pendakwah Islam antara lain para Wali Songo, menggunakan media seni, baik seni wayang,<sup>9</sup> gamelan, sastra, dan sebagainya, sebagai sarana untuk mengintrodusir Islam, sehingga mudah menarik minat dan hasrat masyarakat Jawa terhadap agama baru ini. Mereka menghindari cara-cara radikal dalam menyebarkan Islam, dan sebaliknya, mengambil cara-cara persuasif dan damai (*penetration pacifique*) dengan tetap membiarkan dan mengakomodir tradisi yang telah melekat sebelumnya di tengah masyarakat. Doktrin *al-muhâfazatu 'alâ al-qadîmi al-şâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-aşlah* (memelihara hal-hal lama (tradisi) yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik) menjadi doktrin yang sampai sekarang dipegang erat oleh kaum Islam tradisional dalam memelihara tradisi-tradisi lama.

Islamisasi di ranah politik berjalan demikian cair, tanpa ada pergelakan sama sekali. Diperkirakan

<sup>9</sup>Sunan Kalijaga misalnya, memasukan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam pertunjukan seni wayang. Pengenalan jamus kalimosodo (dua kalimat syahadat), juga penggambaran empat tokoh punakawan yang digambarkan arif dan bijaksana, yaitu Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, adalah personifikasi dari ucapan Ali bin Thalib, "*itsmar khairan, fatruk ma bagha*" (kerjakan yang baik dan tinggalkan yang jelek). Dengan metode penyebaran persuasif seperti ini, islamisasi budaya Nusantara berjalan dengan sangat damai dan dapat diterima dengan tanpa menimbulkan resistensi penduduk lokal.

abad 13 sampai 15 Islam sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Nusantara dengan tampilnya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-13 M dengan raja pertamanya, Merah Silau yang berganti nama menjadi Sultan Malik al-Shalih, tumbuh menjadi kerajaan yang dapat menyaingi kebesaran Sriwijaya di Palembang. Selanjutnya di Jawa, di akhir abad 15 M dan awal abad 16 di pusat-pusat perdagangan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Demak, Cierobon dan Banten juga telah menunjukkan aktivitas agama Islam. Kerajaan Demak dengan raja pertamanya Raden Patah berhasil menggeser kejayaan Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu, Islam telah berperan secara politik, di mana posisi para wali dengan bantuan penguasa kerajaan Demak, kemudian Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam tidak hanya di Jawa tetapi kemudan menyebar sampai ke Ternate, Tidore, Sulawesi, Lombok, dan sebagainya. Symbiosis mutualisme lagi-lagi terjadi antara ulama dan penguasa. Ulama memerlukan perlindungan demi memperlancar dakwahnya, sedangkan penguasa (raja) membutuhkan legitimasi dari ulama sebagai 'wakil Tuhan di bumi' agar lebih *legitimate* di depan rakyat. Oleh karena itu, umumnya raja-raja ataupun keluarga raja kerajaan Islam segera berganti nama menjadi nama Islam atau menyematkan gelar keagamaan di belakang namanya. Raja Mataram yang bernama Raden Mas Jatmiko (memerintah 1613-1645 M) juga memiliki gelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo, sebuah gelar pemberian Syarif Mekkah setelah utusannya pada tahun 1641 M menghadap ke Syarif Mekkah.<sup>10</sup> Sedangkan Pangeran Diponegoro, yang masih berasal dari keluarga kerajaan Mataram bergelar Sultan Ngabdulkamid

<sup>10</sup> Azra, Azyumardi, *Renaissance Islam Asia Tenggara; Sejarah, Wacana Dan Kekuasaan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.), 78.

Herucakra Kabirulmukminina Kalifatul Rasulullah Hamengkubuwana Senapati Ing Ngalaga Sabilullah Ing Tanah Jawa.<sup>11</sup> Sebutan raja pun berganti dengan istilah sultan. Gelar keagamaan ini bertujuan untuk semakin mengukuhkan kedudukan mereka tidak hanya sebagai pemimpin sosial dan penguasa politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Kemanunggalan sejati antara raja, ulama dan rakyat juga tampak dalam tata letak yang menyatu (berdekatan) antara keraton sebagai simbol kekuasaan kerajaan, masjid sebagai tempat ibadah yang merepresentasikan kekuasaan ulama, dan alun-alun sebagai representasi tempat berkumpulnya rakyat. Gambaran tiga komponen ini hampir selalu terlihat di setiap pusat kerajaan di Nusantara.

Kerajaan Islam lainnya adalah Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi. Raja pertamanya, I Mallinggaeng Daeng Njonri Karaeng Katangka, masuk Islam pada hari Jumat, 22 September 1605 M atau Jumadil Awal 1014 H, yang kemudian bergelar Sultan Abdullah Awallul Islam. Masuk Islamnya Raja Gowa Tallo ini kemudian diikuti oleh rakyatnya, dengan dilakukannya shalat berjamaah pada November 1607 M. Pada awal abad ke-17, Islam sudah merata di hampir seluruh nusantara. Penyebaran Islam yang semula dilakukan oleh para musafir dari Arab, Persia, dan Gujarat, mulai abad 14 telah dilakukan oleh para muballigh nusantara seperti Wali Songo, Sunan Prapen, Dato Ri Bandang, Dato Sulaiman, Khatib Dayan, dan sebagainya.

Munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara yang bercorak agama, baik Hindu, Budha maupun Islam seperti yang diuraikan di atas setidaknya menarasikan betapa nilai-nilai religiusitas tidak bisa dilepaskan dari denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan ia bisa berkolaborasi dengan kekuasaan dengan

sangat harmonis. Hal ini tentu saja meniscayakan adanya pembagian peran yang jelas antara penguasa dan ulama, tidak saling menjatuhkan atau bahkan menafikan salah satu diantaranya.

## **Mengurai Doktrin Politik dalam Agama-agama**

### **Doktrin Politik menurut Agama Hindu**

Tidak hanya Islam yang memiliki doktrin tentang bagaimana relasi antara agama dan politik. Dalam kepustakaan Hindu, Budha dan Kristen juga dijumpai terminology dan doktrin yang terkait dengan relasi hubungan agama dan negara. Dalam kepustakaan Hindu seperti *Canakya Niti Sastra*, *Kekawin Ramayana*, *Mahabharata*, dan *Lontar Janiti*, dijumpai kosakata yang berkenaan dengan unsur-unsur konstitutif suatu Negara seperti *praja*, *wadya* (rakyat), *rat* (negara, rakyat), *jagat*, *janapada*, *loka* (wilayah Negara), *prabu*, *ratu maharaja* (kepala pemerintahan), dan sebagainya. Tujuan negara menurut Hindu adalah menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat lahir batin, antara lain tercantum dalam Yayur Weda V.27, Atharwa Weda XIII.I.34, dan Atharwa Weda XII.3.10. Relasi antara agama dan negara didasarkan pada hubungan saling menghormati, seperti yang dilukiskan dalam hubungan *wiku* (agama) dan *natha* (kekuasaan) atau *purohito* (raja) yang merupakan tiang-tiang yang menentukan kokohnya negara. *Wiku* memberikan nasehat kepada *natha* mengenai persoalan yang berkaitan dengan nilai moral dan spiritual, sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan dharma dan membawa kemakmuran bagi rakyat.<sup>12</sup>

Di Indonesia, ajaran Hindu diaplikasikan dengan kental di Pulau Bali. Sementara itu, selain India yang mayoritas warganya beragama Hindu,

---

<sup>11</sup> Carey, Peter, *The Power of Prophecy; Prince Dipanegara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. (Leiden: KITLV Press, 2007), 72.

---

<sup>12</sup> Mahendra, Oka, 'Konsep Negara Dalam Pandangan Hindu', *Forum Keadilan*, 2000.

Negara Nepal juga menganut system Hindu. Kemurnian ajaran Hindu masih sangat terjaga di Nepal.

### **Doktrin Politik menurut Agama Budha**

Sementara itu, melacak akar theologis konsep negara dalam ajaran Budha memang agak terbatas. Banyak pengamat menilai hal ini disebabkan karena ajaran Budha yang lebih menekankan disiplin spiritual asketik yang dalam, sehingga jauh dari politik. Namun begitu, hal ini bukanlah berarti Budha ‘alergi’ terhadap kehidupan politik. Konfisionisme yang dianut orang Tiongkok lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak pemerintahan Raja Han (205-220 SM), tak ubahnya ajaran Budha, menekankan moralitas sebagai hal utama pemerintahan. Konfusius mengajarkan *te*, yaitu ajaran seni memerintah. Satu di antaranya adalah penolakan atas penggunaan kekerasan fisik dalam pemerintahan.<sup>13</sup>

Ajaran Budha yang masih melekat dalam sebuah negara bisa dilihat pada Negara Jepang, Kamboja, dan Thailand. Rakyat Jepang dan Thailand menganggap raja dan kaisar mereka sebagai titisan Dewa. Sedangkan di Thailand, seorang Raja harus menjadi rahib sebelum menjadi penguasa. Sedangkan di Srilanka, negara berpenduduk mayoritas Budha, para biksu mempropagandakan masyarakat *dhammic*, yaitu masyarakat yang diperintah oleh pemimpin yang menjunjung tinggi dhamma, ajaran Budha. Para pemimpin Srilanka senantiasa mengajak para Biksu untuk bermusyawarah menentukan kebijakan negara. Karena mereka menyadari bahwa mereka harus memberi pancaran *Budha Sinhala* pada gerakan politik mereka agar tidak ditinggalkan para biksu.

<sup>13</sup> *Forum Keadilan* Edisi khusus, 2000, h. 87.

### **Doktrin Politik menurut Agama Kristen**

Menelusuri sejarah relasi antara agama Kristen dengan Negara, gereja pernah memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar dan menentukan di Eropa pada abad pertengahan. Hal ini bukannya tidak memiliki dasar theologis sama sekali. Di kalangan Kristen misalnya, dikenal terminology “*kerajaan imamat*” yang berasal dari Kitab Keluaran 19:3, “*Kamu akan menjadi kerajaan imamat dan bangsa yang kudus*”. Santo Aurelius Agustinus (354-430 M) yang pikiran-pikirannya menjadi dasar sekaligus awal sejarah kekuasaan gereja, mendasari pemikiran politiknya pada tiga tema besar, yaitu penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan penyelamatan. Baginya, Tuhan bergerak pada tataran keabadian yang berbeda dengan tataran waktu. Tuhan adalah dasar segala keberadaan dan sumber seluruh ciptaan. Maka iapun mencita-citakan negara Tuhan (*civitas dei*), suatu konsep kekuasaan yang berada di bawah pemerintahan Tuhan.<sup>14</sup>

Selama lebih dari 100 tahun di abad pertengahan, gereja sukses menghegemoni negara di Eropa. Sayangnya, hegemoni gereja kemudian diikuti dengan pembonsaian terhadap kreatifitas ilmiah akibat dari doktrin gereja yang tidak selaras dengan hasil-hasil ilmiah ilmu pengetahuan. Interaksi dengan dunia Islam, baik melalui jalur perdagangan, pendidikan maupun perang salib, membuka mata masyarakat Eropa atas abad kegelapan yang mereka alami. Mereka menggugat dominasi gereja yang selama ini membelenggu kebebasan berfikir. Reformasi gereja yang dimotori Marthin Luther dan John Calvin pada abad ke-16 yang didukung masyarakat Eropa akhirnya berhasil meruntuhkan pengaruh gereja atas Negara-negara Barat. Pada abad yang sama, Machiavelli menulis buku “*Leviathan*”, sebuah teori

<sup>14</sup> ‘Di Antara Kuasa Ruhani Dan Politik’, *Forum Keadilan*, 2000, 90.

Negara sekuler, “Berikanlah dunia kepada penguasa dan serahkanlah kepada Tuhan segala yang berhubungan dengan Tuhan (agama)”.<sup>15</sup>

Gerakan reformasi gereja tidaklah sampai mengakhiri kekuasaan gereja sama sekali. Pada tanggal 11 Februari 1929 ditandatangani perjanjian Lateran antara tahta suci yang diwakili Kardinal Pietro Gasparri dan Kerajaan Itali yang diwakili Benitto Musolini. Pasal-pasal terpenting dari perjanjian ini adalah pengakuan berdirinya Vatikan, pengakuan hak istimewa wilayah eks teritorial pada tempat bangunan gereja dan diresmikannya Katholik sebagai agama resmi negara dengan nama *Stato Della Citta del Vaticano*. Dengan perjanjian inilah Sri Paus memiliki posisi hukum internasional sebagai kepala rohani gereja Katholik. Akan tetapi sesungguhnya posisi ini bukanlah semata-mata berasal dari perjanjian ini, melainkan bersumber dari sabda Yesus yang menugaskan Petrus dan penggantinya untuk mengepalai gereja-Nya di dunia. Ia memperoleh gelar kepala gereja Katholik universal, kepala Negara Vatikan dan wakil Kristus di dunia.

Di Indonesia, para aktivis Kristen pernah mendeklarasikan berdirinya Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tanggal 10 November 1945. Ia mengembangkan pemahaman politik sesuai teokrasi al-kitabiah. Pandangan politik Parkindo yang cenderung teokratis setidaknya terlihat dalam pasal 1 dan 2 pendirian Parkindo, “Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan”. Serta “Partai Kristen berpendirian bahwa negara berwujud karena kehendak Tuhan, dan dengan tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia agar dapat dipersiapkan untuk hidup dalam alam yang kekal dan sejati yang akan datang

pada akhir zaman”.<sup>16</sup> Jauh sebelum itu, Idenburg Gubernur Jenderal Hinda Belanda 1909-1916 pernah bersumpah bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai Kristen menjadi agama bangsa Indonesia.

### Sejarah Pemikiran Politik dalam Islam

Diskursus tentang politik dan relasinya dengan agama dalam Islam masuk dalam kajian *fiqih siyasah* atau *siyasah al-syar’iyyah* atau *al-ahkam al-shulthaniyyah* (hukum pemerintahan). Akan tetapi, para cendekiawan Muslim tidak sepakat dengan bagaimana bentuk relasi antara agama dan negara (politik). Setidaknya terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam umat Islam tentang keterkaitan antara keduanya. **Pertama** adalah paradigma formalistik/ tradisional, yang beranggapan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, universal, komprehensif dan integral. Maka, *fiqih siyasah* adalah bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh, kelompok ini mengatakan bahwa system ketatanegaraan yang harus diteladani adalah system pemerintahan yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan *Khulafa al-Rasyidun*, yaitu system kekhalifahan. Maka bagi kelompok ini, mendirikan *Daulah Islamiyah* adalah sebuah cita-cita yang selalu mereka upayakan.

Beberapa ulama yang masuk dalam kelompok ini antara lain adalah Al-Ghazali. Menurutnya, “Dunia adalah ladang akhirat. Agama tak sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran. Agama adalah tiang, penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh, dan apa yang tidak dijaga akan hilang”.<sup>17</sup> Begitu juga menurut Al-Maududi, “Gerakan untuk memperkenalkan hukum

<sup>15</sup> ‘Di Antara Kuasa Ruhani Dan Politik’, 90.

<sup>16</sup> ‘Berjuang Mengusung Al-Kitab’, *Forum Keadilan*, 2000, 57.

<sup>17</sup> Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Negara* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 38.



*Islam dan pembentukan negara Islam adalah bagian dari kebangkitan kembali dan rehabilitasi Islam. Aneh jika ada seorang Muslim yang tidak menginginkan negara Islam*".<sup>18</sup> Ulama kontemporer, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat, "*Mendirikan Negara Islam merupakan kebutuhan Islami sekaligus kebutuhan insani*"<sup>19</sup> Sedangkan tokoh nasional Indonesia, M. Natsir mengatakan dalam sidang Majelis Konstituante 12 Nov 1957: "*...supaya Negara RI kita ini berdasarkan Islam, Negara Demokrasi berdasarkan Islam*".<sup>20</sup>

Kelompok **kedua** adalah paradigma sekuler, yang berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik. Ulama Mesir, Ali Abdul Raziq adalah tokoh yang berpendapat seperti itu, Menurutnya, "*Kehadiran Islam sama sekali terlepas dari negara. Misi yang dibawa Muhammad SAW adalah murni misi keagamaan. Tidak ada pemerintahan dan negara, tidak ada kecenderungan terhadap politik, dan tidak ada tujuan para raja ataupun pemberi pemerintah*".<sup>21</sup>

Pendapat **ketiga** adalah paradigma substantifistik, yaitu kelompok yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala system kehidupan termasuk system ketatanegaraan, tetapi juga menolak pandangan sekuler bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Paradigma ini berkeyakinan bahwa tidak ada satu teks pun dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadits yang

memerintahkannya sebuah *khilafah* atau *Daulah Islamiyyah*, Negara Islam. Akan tetapi Al-Qur'an mengatur seperangkat prinsip yang mengatur pola hubungan antara masyarakat, etika pergaulan, prinsip-prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan, penegakkan hukum, kepemimpinan, moral, dan sebagainya.

Sejarawan Mesir, Muh. Husein Haikal mengatakan bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW tidak meletakkan undang-undang tertentu bagi system pemerintahan Islam, namun Islam membawa undang-undang baru bagi sebagai pedoman dasar bagi perbuatan manusia, yang selanjutnya dijadikan pijakan dan inti bagi pengembangan system politik. Pedoman-pedoman tersebut adalah tauhid, keesaan Tuhan yang membawa manusia kepada asas persamaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikha*), dan kebebasan (*al-huriyyat*).<sup>22</sup> Beberapa cendekiawan Muslim Indonesia yang sependapat dengan Haikal antara lain Harun Nasution. Menurutnya "*Al-Qur'an tidak secara tegas mengatur system politik, ekonomi, social, dan sebagainya, tetapi hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja*". Alasannya, menurut tokoh pembaharu Islam Indonesia ini, karena bagi masyarakat berkembang yang memiliki sifat dinamis, system tidaklah terlalu diperlukan, yang dibutuhkan adalah prinsip-prinsip yang dengannya masyarakat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) berpendapat bahwa, "*Masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Nilai negara dan pemerintahan dalam Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu*

<sup>18</sup> al-Maududi, Abul 'Ala, *Khilafah Dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1984).

<sup>19</sup> Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Negara*, 24.

<sup>20</sup> Natsir, Muhammad, *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: media Dakwah, 2001), 200.

<sup>21</sup> Raziq, Ali Abdul, 'Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara', in *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 4.

<sup>22</sup> Haikal, Muh. Husein, *Al-Hukumat Al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, n.d.), 32.

<sup>23</sup> Nasution, Harun, 'Islam Dan Sistem Pemerintahan Sebagai Yang Berkembang Dalam Sejarah', *Jurnal Islamica* 17 (July 1985): 112.

*sendiri. Yang terpenting adalah ethical values. Apapun bentuknya, asal nilai yang dijalankan adalah nilai yang dikehendaki Allah sebagai negara yang diridhai ”.*

Perbedaan paradigma dalam memandang relasi antara negara dan agama inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk system negara dalam dunia Islam. Ada yang berbentuk monarchie, federasi, republik, bahkan sekuler, dan sebagainya. Cendekiawan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra memasukkan Indonesia bukan sebagai Negara Islam, tetapi menyebutnya sebagai Negara Muslim.<sup>24</sup> Karena meski mayoritas warganya menganut agama Islam, akan tetapi konstitusi negara tidak menyatakan Islam sebagai dasar negara.

### **Problematika Islam dan Negara; Pengalaman Indonesia**

Pergumulan antara Islam dan negara Indonesia terjadi sangat intens dan dinamis mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara, meski secara kuantitas mayoritas warganya adalah Muslim, adalah salah satu dari contoh dialektika yang terjadi antara Islam dan negara. Perdebatan sengit tentang dasar negara antara dua kubu<sup>25</sup> yang berseberangan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) periode Mei dan Juni 1945 antara kubu Islam yang menginginkan

dijadikannya Islam sebagai dasar negara, berserangan dengan kubu nasionalis yang menolak ide ini. Lahirnya Piagam Jakarta<sup>26</sup> pada tanggal 22 Juni 1945 merupakan kompromi politik tertinggi yang berhasil meredakan ketegangan dua kubu ini. Dalam naskah inilah, pada alinea ke-4 terdapat Pancasila versi Soekarno yang telah dimodifikasi, dan sila pertama berbunyi, “*Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya*”.

Kebesaran hati dan pengorbanan umat Islam Indonesia diuji ketika beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan, masyarakat Indonesia Timur berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata sila pertama, dan mengancam akan keluar dari NKRI jika tujuh kata itu tidak dihapuskan.<sup>27</sup> Menurut mereka, kalimat itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Akhirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang baru saja berdiri, para pemimpin Islam merelakan dihapuskannya tujuh kata sakral dalam Piagam Jakarta, dan digantikan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”, redaksi yang diajukan Ki Bagus Hadikusumo.

Dalam amatan mantan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah, M. Dien Syamsuddin, rumusan kalimat *Ketuhanan dengan Kewajiban*

---

<sup>24</sup> Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 22.

<sup>25</sup>Panitia Sembilan yang dibentuk PPKI terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu nasionalis sekuler antara lain Soekarno, Muh. Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muh. Yamin serta AA Maramis mewakili Kristen menolak agama sebagai dasar negara. Sedangkan kubu nasionalis Islam beranggotakan Abdul Kahar Muzakar, Agus Salim, Abdl Wahid Hasyim dan Abikusno Tjokrosuyoso menghendaki Islam sebagai dasar Negara.

---

<sup>26</sup>Mr. Muh. Yamin menyebut Piagam Jakarta sebagai *Jakarta Charter*, Prof. Soepomo menyebutnya dengan “Perjanjian Luhur”, sedangkan Dr. Soekirman menyebutnya dengan *Gentlemen Agreeemen*.

<sup>27</sup>Beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Hatta menerima telpon dari seorang opsir Angkatan Laut yang menyampaikan pesan dari seorang tokoh nasrani dari Indonesia Timur yang keberatan dengan tujuh kata dalam sila pertama. Untuk beberapa saat, tidak ada yang tahu siap penelpon misterius itu, hingga kemudian pada tahun 1984 Cornel University, AS menginformasikn bahwa penelpon itu adalah Dr. Sam Ratulangi. Lihat Firdaus AN, *Dosa-dosa yang Tak Boleh Terulang Kembali*, (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet.ke-I, h. 48.

*Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya*” bukanlah sebuah visi yang sektarianistik melainkan tetap tetap diletakkan atas dasar kebangsaan. Ia merupakan sebuah pengakuan atas realitas social dan historis karena jauh sebelum kemerdekaan, terutama saat berdirinya kesultanan dan kerajaan Islam di Nusantara, bangsa ini sudah mengamalkan syariat Islam. Ketika realitas itu diangkat menjadi salah satu rumusan dasar negara, maka rumusan itu disetujui oleh semua kelompok dalam panitia Sembilan, termasuk tokoh nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh Kristen A.A Maramis. Syariat dalam pengertian terbatas atau dalam bahasa fiqhnya *al-ahkam al-sakhsiyah* seperti nikah, talak, waris, dan sebagainya inilah yang diangkat kembali. Akan tetapi ketika terjadi keberatan dari tokoh-tokoh Kristiani dari Indonesia timur pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka demi persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh Islam dengan visi dan watak kenegarawan yang tinggi akhirnya rela untuk menghapus kata sacral dalam sila pertama Pancasila.<sup>28</sup>

Iktikad para pemimpin Islam yang merelakan dihapuskannya tujuh kata dalam sila pertama demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI rupanya tak bisa mencegah munculnya disintegrasi bangsa. Intervensi Belanda yang masih ingin mencengkeramkan kakinya di bumi Indonesia, menjadikan Negara Indonesia kembali pada situasi politik tak menentu. Lahirnya UUD RIS pada 27 Desember 1949 tidak hanya merubah system pemerintahan, tetapi juga merubah bentuk negara. Sistem pemerintahan presidensial seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, berubah menjadi system parlementer,

<sup>28</sup>Dien Syamsuddin, 'Indonesia Sebagai Negara Kesepakatan (Darul Ahdi)', in *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013). H. xiii.

dan Negara kesatuan (Pasal 1 UUD 1945) berubah menjadi negara federasi yang mengharuskan pemerintahan RIS mengakui Ratu Belanda sebagai kepala negara persekutuan. Republik Indonesia Serikat telah mengkotak-kotakan dan mengubur NKRI.

Rakyat Indonesia terbelah menghadapi kondisi ini, antara yang pro NKRI (prounitarian) dan yang profederalis. Kondisi Negara Indonesia selanjutnya bisa ditebak, beberapa daerah bergolak. Dalam kondisi seperti inilah, M. Natsir yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Masyumi mengambil inisiatif untuk membuka dialog dengan berbagai kalangan. Ia berkeliling daerah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik yang prounitarian maupun yang profederalis. Natsir tidak ingin terjebak dalam pusaran dua arus ini, tetapi ia menghendaki penyelesaian komprehensif dan tidak membiarkan rakyat mencari jalannya sendiri. Tanggal 3 April 1950, Natsir mempelopori lahirnya Mosi Integral, semacam proklamasi kedua. Melalui mosi ini, Indonesia kembali utuh. Pemerintah segera menerbitkan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. **Mosi Integral menjadi semacam bukti yang menegaskan cinta umat Islam terhadap NKRI.<sup>29</sup> Bahwa NKRI adalah harga mati.**

Meski begitu, adanya doktrin *khilafah* atau *Daulah Islamiyah* yang dianut sebagian kecil komunitas Muslim, ditambah dengan peristiwa deklarasi *Darul Islam* oleh SM Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949, meninggalkan trauma sejarah bagi hubungan antar Islam dan Negara di Indonesia. Perlakuan yang dialami Umat Islam Indonesia di setiap periode pemerintahan hampir selalu sama. Tidak hanya marginalisasi di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi obyek yang cenderung dicurigai sebagai kelompok yang ingin merubah

<sup>29</sup> Masha, Nashihin, 'Mosi Integral Hidupkan NKRI', *Republika*, 7 April 2017.

ideology Pancasila, menolak NKRI, menolak Bhineka Tunggal Ika.

Depolitisasi umat Islam paling kentara terjadi di awal rezim Orde Baru. Harapan umat Islam agar pemerintah merehabilitasi Masyumi, partai Islam yang dibubarkan Soekarno karena desakan PKI, kandas ketika Soeharto menolak usulan beberapa tokoh Islam. Soeharto bahkan memfusikan partai-partai Islam menjadi satu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dua partai gurem yang tidak pernah bisa menandingi dalam pemilu menghadapi kendaraan partai pemerintah, Golkar. Beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai bertentangan dengan aspirasi Umat Islam antara lain *pertama*, pembangunan yang sangat pragmatis seperti legalisasi tempat-tempat perjudian, prostitusi, pendirian kilang dan pabrik miras, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan Porkas, yaitu bentuk permainan judi terselubung di bawah kementerian social RI, bertahan hingga 15 tahun sampai akhirnya dibubarkan pada tahun 1993, setelah gelombang protes dari umat Islam dan para ulama. *Kedua*, larangan dan intimidasi kepada siswi Muslimah berjilbab di sekolah-sekolah negeri, berdasarkan PP No.052/C/Kep.D.82 tanggal 17 Maret 1982, dan sebagainya. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, seperti peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa Talangsari, Lampung tahun 1989, penangkapan tokoh-tokoh Islam karena dituduh melakukan tindakan subversive dan makar yang akan mengganti ideology Pancasila dengan ideology Islam, dan sebagainya, memperlihatkan tindakan represif yang dialami umat Islam oleh pemerintah Orde Baru. Inilah fase yang

digambarkan sebagai bentuk antagonistic Umat Islam dan Negara.<sup>30</sup>

Memasuki tahun 1990-an, terjadi perubahan sikap dan kebijakan pemerintah Orde Baru dari yang antagonistic menjadi akomodatif. Penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal oleh ormas-ormas Islam sedikit meredakan hubungan antara umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Munculnya cendekiawan Muslim seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, Azyumardi Azra, Kuntowijoyo, dan sebagainya, juga berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Desember 1990, didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta koran nasional *Republika*, berkontribusi besar dalam pencerahan pemikiran modern di Indonesia. Begitu juga program pengiriman seribu da'i ke pelosok daerah di tanah air, penyelenggaraan Festival Istiqlal mulai tahun 1991 yang menyedot animo masyarakat yang begitu besar, dan sebagainya, menandai kemesraan umat Islam dan pemerintah.

Kini, pasca reformasi, negeri ini berada pada masa-masa kritis dalam hal kebangsaan dan keindonesiaan, jauh dari semangat dan nilai-nilai yang ingin dikembangkan oleh para *founding fathers* negeri ini. Semboyan Nawa Cita dan Trisakti yang dulu didengungkan presiden pertama RI, Soekarno, dan diniatkan untuk diteruskan presiden sekarang, yaitu berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, hanya tinggal slogan belaka. Hal yang paling mengkhawatirkan tentu saja adalah munculnya sekat-sekat dalam masyarakat akibat ulah seorang gubernur yang tidak bisa menjaga lisannya dan dianggap telah menistakan agama. Proses hukum yang berjalan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, pada akhirnya melebar hingga memunculkan gerakan

---

<sup>30</sup> Karim, M. Rusli, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

massa yang sangat menguras energy bangsa. Munculnya tuduhan makar terhadap beberapa tokoh nasional, kriminalisasi ulama, sampai perang sosmed di dunia maya, membuat gaduh negeri yang dulu dikenal sangat guyub dan santun ini. Persoalan yang sebenarnya bisa dilokalisir di ranah hukum akhirnya bergeser ke masalah politik dan agama. Mereka yang menuntut ditegakkannya hukum seadil-adilnya atas kasus penistaan agama, dalam hal ini umat Islam, dituduh telah menjadi biang keretakan bangsa, anti Pancasila, anti Bhineka Tunggal Ika, anti NKRI. Sementara pihak yang lain dituduh sebagai antek konglomerat hitam, antek China, dan sebagainya. Entah sampai kapan polarisasi anak bangsa ini akan tetap berlangsung.

Dulu, menjelang pemilu raya pertama tahun 1955, Masyumi juga pernah menerima berbagai macam tuduhan dan *black campaign* dari para lawan politiknya. Yaitu jika Masyumi menang, Indonesia akan mengalami perubahan mendasar, antara lain Bung Karno akan diganti, bendera merah putih akan diganti bulan bintang, lagu kebangsaan Indonesia Raya akan diganti lagu marhaban, tentara akan diganti GPII (sebuah organisasi kepemudaan), dan terakhir, Pancasila akan diganti.<sup>31</sup> Kini, hal serupa berulang kembali, Islam selalu saja dibenturkan dengan keindonesiaan. Padahal sejarah telah membuktikan, umat Islam selalu berada di garda terdepan dalam membela kedaulatan bangsa dan negara RI. Resolusi Jihad yang digelorakan ulama pada 22 Oktober 1945 telah membakar semangat para santri Hizbullah dan Sabilillah dalam pertempuran 10 November 1945 mengusir tentara NICA. Mosi Integral yang dipelopori Masyumi 3 April 1950 telah mengembalikan keutuhan NKRI dari skenario penjajah memecah belah

<sup>31</sup> Masha, Nashihin, 'Riwayat Pembenturan Islam Dengan Keindonesiaan', *Republika*, Mei 2017.

bangsa. Tahun 1965 bersama dengan tentara, umat Islam berjibaku melawan ideology komunis, setelah sebelumnya umat Islam menjadi korban kekejaman PKI di berbagai daerah sejak pemberontakannya tahun 1948 di Madiun.

### Konsep Negara dalam Perspektif Muhammadiyah

Bagi umat Islam sudah sangat jelas, bahwa Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah final. Ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dalam muktamar ke-47 bulan Juli tahun 2015 telah menegaskan NKRI sebagai *Darul 'Ahdhi was syahadah* (Negara yang terbentuk di atas konsensus nasional dan tempat kesaksian/pembuktian) untuk menjadi Negara yang aman dan damai (*darussalam*).<sup>3233</sup>

Sejak berdirinya pada 18 November 1912, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, tetapi organisasi social kemasyarakatan dan kultural. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam non-politik, meski tidak anti politik. Muhammadiyah memposisikan politik selain sebagai bagian integral ajaran Islam, juga berfungsi sebagai instrument meraih cita-citanya, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, Kyai Ahmad Dahlan tidaklah menegasikan politik. Selama 8 tahun sejak 1909 beliau menjadi anggota dan advisor Budi Utomo dan Partai Sarekat Islam. Tahun 1917 dlm Kongres Budi Utomo bertempat di pesantrennya, pengurus Budi Utomo mengajukan pasal dalam Anggaran Dasar, "Mempertahankan Agama Islam tanpa

<sup>32</sup>Negara Pancasila sebagai Darul Ahdhi wa Asyasyahadah, *Suara Muhammadiyah*, Edisi No.20 Th ke-100, 16-31 Oktober 2015.

<sup>33</sup> 'Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdhi Wa Asyasyahadah', *Suara Muhammadiyah*, 31 Oktober 2015.

*menyalahi kebebasan beragama*". Dalam Kongres Umat Islam I (1922) di Cirebon yang disponsori oleh Muhammadiyah dan Sarekat Islam, Ahmad Dahlan menggulirkan gagasan politik, yang kembali digulirkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah yang terakhir diikutinya pada tahun 1922. *"Masa sekarang boleh dikatakan masa Islam bangun. Persyarikatan berasaskan Islam itulah tanda-tanda dan kenyataannya, misalnya Persyarikatan Syarekat Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain. Orang Islam sudah mulai, memulai bangun kepada agamanya. Kita harus berikhtiar supaya sesudah bangun itu mendapatkan jalan yang betul (shirathal mustaqim). Jalan yang betul adalah agama Islam sejati"*.

Muhammadiyah juga memiliki pokok pikiran tentang politik. Dalam Anggaran Dasarnya, Muhammadiyah tidak mencantumkan istilah Negara Islam (*Ad-Daulah Al-Islamiyyah*). Karena cita-cita Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islami dan penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini bukan berarti Muhammadiyah menolak pemberlakuan syariat Islam. Akan tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, pelegal-formalan Islam dalam konstitusi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi politik umat Islam, ruang dan waktu dewasa ini. Penjelasan PP Muhammadiyah, *"...Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Islam, tentu saja Muhammadiyah berada di garis depan untuk segala usaha penegakkan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, karena kewajiban menjalankan syariat Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita terhadap kebenaran Islam sebagai agama"*

Pokok pikiran ketiga Anggaran Dasar Muhammadiyah: *"Masyarakat yang*

*sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas dari pengaruh syetan dan hawa nafsu"*.

Beberapa tokoh Muhammadiyah memiliki konsep dasar tentang negara. Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir, KH Mas Mansur, dan Kasman Singodimedjo adalah beberapa tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif dalam menyampaikan gagasan dan konsep awal ketatanegaraan NKRI dalam BPUPKI maupun Panitia Sembilan. Ki Bagus Hadikusumo-lah yang merumuskan kalimat '*Ketuhanan Yang Maha Esa*' sebagai kompromi politik yang disepakati semua elemen bangsa ketika kalimat *"Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya"* yang terdapat dalam Piagam Jakarta dan dituangkan dalam sila pertama Pancasila mendapat reaksi negative dari tokoh non-Muslim.

Dengan mengutip pendapat pemimpin Al-Ihwan al-Muslimun, yaitu Abdul Qadir Audah dalam bukunya yang berjudul *al-Tasyrik al-Fihana al-Islami*, Kahar Muzakir Muzakir mengajukan tiga konsep *Darul Islam* yang membedakannya dengan *Darul Harb*, yaitu *pertama*, *Darul Islam* adalah tiap negara yang penduduknya semua Muslim. *Kedua*, tiap negara yang dikuasai dan diperintah kaum Muslim meskipun penduduknya sebagian besar bukan Muslim, dan *ketiga Darul Islam* adalah tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh bukan Muslim tetapi kaum Muslim bisa menjalankan hukum-

hukum Islam atau tidak ada halangan untuk menjalankan hukum Islam.<sup>34</sup>

Kini, di tengah suasana adanya kecurigaan satu sama lain di antara elemen bangsa akan hadirnya ideologi lain selain Pancasila yaitu seperti ide khilafah, komunis, dan lain sebagainya, Muhammadiyah menegaskan sikap dan pandangannya bahwa NKRI adalah *Darul 'Ahdî was syahadah* (Negara yang terbentuk di atas konsensus nasional dan tempat kesaksian/pembuktian) untuk menjadi Negara yang aman dan damai (*darussalam*). Penegasan sikap Muhammadiyah ini dituangkan dalam keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2012 yang kemudian dikukuhkan kembali dalam Muktamar di Makasar tahun 2015. Di antara butir penegasannya ada dalam kuputusan hasil tanwir tentang Kristalisasi Ideologi dan Khittah Muhammadiyah butir ke empat yang berbunyi, “Muhammadiyah menerima NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai consensus nasional yang mengikat seluruh warga dan komponen bangsa. Empat pilar tersebut harus diletakkan sebagai system perikehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat terbuka sehingga mampu mengantarkan Indonesia pada pencapaian cita-cita nasional dalam semangat kemerdekaan dan kebersamaan. Muhammadiyah terus berikhtiar mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sehingga bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam karakter diri yang relijius, moderat, cerdas, dan mandiri. Muhammadiyah bersama segenap komponen bangsa

senantiasa berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam jiwa dan idealisasi “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*”.<sup>35</sup>

Penerimaan terhadap empat pilar negara yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika juga terjadi dalam organisasi Islam Indonesia mainstream lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya. Maka, sejatinya tidak ada yang perlu meragukan keindonesiaan umat Islam.

#### D. Kesimpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukanlah Negara agama, yang menerapkan konstitusinya berdasarkan agama tertentu, yang ideologinya menganut ideology agama tertentu. Tetapi Indonesia juga bukanlah Negara sekuler, yang menafikan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan membatasinya hanya dalam wilayah privat. Akan tetapi, seperti yang dicita-citakan para *founding fathers*, Indonesian adalah sebuah negara beragama, yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diletakkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dalam Pancasila menegaskan komitmen religiusitas bangsa Indonesia. Penegasan bangsa Indonesia sebagai negara bertuhan juga dikuatkan dalam UUD 1945 pasal 29.

Slogan *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*, (walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, karena tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda) yang digali dari buku Sutasoma karya Empu Tantular (1365) hidup pada masa kejayaan Majapahit, mengindikasikan sudah adanya satu

<sup>34</sup> Syaifullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).h. 72

<sup>35</sup> Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).h. 184

kesadaran dari leluhur bangsa Indonesia tentang pentingnya nilai-nilai toleransi yang harus dikembangkan dalam kehidupan beragama dan berbangsa pada negeri yang sangat plural ini. Menjadi kewajiban seluruh anak bangsa untuk terus merawat kebhinekaan Indonesia, yang menjadi kekayaan sekaligus identitas dan jati diri bangsa.

Merawat kebhinekaan meniscayakan adanya kesepemahaman akan tugas dan peran masing-masing seluruh komponen bangsa. Tidak saling mencampuri, apalagi menjatuhkan. Agama dan tokoh agama harus selalu berada di garda terdepan dalam menjaga moral dan akhlak bangsa, sementara negara berkewajiban menjamin tumbuh kembangnya suasana kehidupan beragama, sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang adil bagi munculnya bibit konflik yang terjadi karena gesekan-gesekan yang mungkin timbul dari praktik-praktik keberagamaan masyarakat. Di atas semua itu, penanaman empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI kepada semua komponen anak bangsa hanya akan efektif ketika *law enforcement* ditegakkan dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Ketika hukum masih tebang pilih, tajam bagi satu pihak tetapi tumpul bagi pihak lain, maka munculnya bibit-bibit konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, utamanya yang dipicu oleh isu-isu agama, tetap tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka, upaya memisahkan agama dari ruang-ruang publik, sejatinya merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yang terangkum dalam empat pilar bangsa Indonesia.

#### Daftar Pustaka

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999.

al-Maududi, Abul 'Ala. *Khilafah Dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1984.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Negara*. Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Ambary. Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban Arkeologi Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Puslit Arkenas, 1998.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996. *Renaissance Islam Asia Tenggara; Sejarah, Wacana Dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.

'Berjuang Mengusung Al-Kitab'. *Forum Keadilan*, 2000.

Carey, Peter. *The Power of Prophecy; Prince Dipanegara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press, 2007.

'Di Antara Kuasa Ruhani Dan Politik'. *Forum Keadilan*, 2000.

haikal, Muh. Husein. *Al-Hukumat Al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Ma'arif, n.d.

karim, M. Rusli. *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.



- Mahendra, Oka. 'Konsep Negara Dalam Pandangan Hindu'. *Forum Keadilan*, 2000.
- Masha, Nashihin. 'Mosi Integral Hidupkan NKRI'. *Republika*. 7 April 2017. 'Riwayat Pembentukan Islam Dengan Keindonesiaan'. *Republika*. Mei 2017.
- Nashir, Haedar. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Nasution, Harun. 'Islam Dan Sistem Pemerintahan Sebagai Yang Berkembang Dalam Sejarah'. *Jurnal Islamica* 17 (July 1985): 112.
- Natsir, Muhammad. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: media Dakwah, 2001.
- 'Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Asyasyadah'. *Suara Muhammadiyah*, 31 Oktober 2015.
- 'Negara, Pendeta Dan Raja'. *Forum Keadilan*, 2000.
- Pusponegoro, Marwah Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Raziq, Ali Abdul. 'Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara'. In *Wacana Islam Liberal*, 4. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Syaifullah. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Syamsuddin, Dien. 'Indonesia Sebagai Negara Kesepakatan (Darul Ahdi)'. In *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Vieke, Bernard H.M. *Nusantara; History of Indonesia*. Kuala Lumpur: Tien Wan Press, 1966.

